

ABSTRAK

SELVIANA. Keterwakilan Politik Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas Tahun 2019. **Skripsi. Prodi Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura. Pontianak 2022.**

Keterwakilan politik perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas dari tahun 2009-2019 masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan hanya dijadikan sebagai syarat oleh partai politik pada pemilu legislatif. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan secara mendalam kepada para informan yang terlibat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil yaitu : a. Kendala politik, dimana belum maksimalnya dukungan partai politik dalam memberikan pelatihan dan pendidikan politik kepada calon legislatif perempuan, b. kendala sosio-ekonomi, dimana faktor keuangan juga menjadi penghambat bagi perempuan untuk maju dalam pemilihan anggota legislatif karena mereka menganggap tidak mampu untuk mengeluarkan dana yang begitu besar dalam proses kampanye. c. Kendala ideologis dan psikologis, faktor ini mempengaruhi keterwakilan perempuan dimana rasa kurang percaya diri yang dimiliki calon legislatif perempuan. Akibat rasa kurang percaya diri yang dimiliki membuat perempuan malu untuk bersaing dengan laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian disarankan, Partai politik harus memberikan pelatihan dan pendidikan politik kepada calon legislatif perempuan, jangan jadikan perempuan sebagai syarat untuk memenuhi kuota 30% pada pemilu legislatif, diperlukannya dukungan dari keluarga untuk perempuan bisa lebih leluasa dalam mengikuti pemilu legislatif, partai politik juga seharusnya sering dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya peran perempuan di lembaga legislatif kepada masyarakat agar kaum perempuan lebih percaya diri dalam mengikuti pemilu legislatif.

Kata kunci: Keterwakilan Politik, Perempuan, DPRD

ABSTRACT

SELVIANA. Women's Political Representation in the Regional People's Representative Council (DPRD) of Sambas Regency in the 2019. **Thesis. Political Science Study Program. Administration Science Department. Faculty of Social Science and Political Science. Tanjungpura University. Pontianak 2023.**

Women's political representation in the Regional People's Representative Council (DPRD) of Sambas Regency from 2009-2019 has not shown a significant increase. The 30% quota policy for women's representation is only used as a requirement by political parties in legislative elections. Researchers used a qualitative descriptive approach, namely an approach that was carried out in depth to the informants involved in this study. In this study the results are: a. Political constraints, where the support of political parties has not been maximized in providing political training and education to women legislative candidates, b. socio-economic constraints, where financial factors are also an obstacle for women to advance in legislative elections because they perceive that they are unable to spend such a large amount of funds in the campaign process. c. Ideological and psychological constraints, these factors affect the representation of women where the lack of confidence that women legislative candidates have. As a result of their lack of self-confidence, women are embarrassed to compete with men. Based on the research results, it is suggested that political parties must provide political training and education to female legislative candidates, do not make women a requirement to fulfill the 30% quota in legislative elections, support from families is needed for women to be more flexible in participating in legislative elections, political parties should also often in socializing the importance of the role of women in legislative institutions to the public so that women are more confident in participating in legislative elections.

Keywords: Political Representation, Women, DPRD



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Keterwakilan Politik Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas Tahun 2019”. Latar belakang dari skripsi ini adalah keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dari periode sebelumnya pada tahun 2009 keterwakilan perempuan ada 5, periode 2014 keterwakilan perempuan ada 6 orang selanjutnya periode 2019 keterwakilan perempuan ada 6 orang dengan persentase 13,33%. Kebijakan kuota 30% belum mampu meningkatkan keterwakilan politik perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas Tahun 2019.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor yang menjadi penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas pada tahun 2019. Dengan rumusan masalah “Apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan politik perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas Tahun 2019”. Dari penelitian untuk menggunakan teori Nadezhda Shvedova yang terdiri dari 3 yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan yaitu : kendala politik, kendala sosio-ekonomi, kendala ideologis dan psikologis. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sambas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan secara mendalam kepada para informan yang terlibat dalam penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian ini agar data dan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Penelitian kualitatif merupakan cara meneliti yang dapat menghasilkan data deskriptif atau gambaran yang lengkap seperti kata tertulis atau lisan dari narasumber atau perilaku yang dapat diamati.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama kurangnya dukungan dari partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan salah satunya masih kurangnya dalam memberikan pelatihan dan pendidikan politik kepada caleg perempuan yang akhirnya menyebabkan kader perempuan belum terlalu mengerti tentang politik, artinya partai politik tidak menjalankan tugasnya sesuai AD/ART untuk memberikan pendidikan politik kepada kader partai, sehingga yang terjadi adalah perempuan hanya dianggap sebagai syarat untuk ikut dalam pemilihan anggota legislatif, kedua beban ganda yang dimiliki kaum perempuan, kondisi ini membuat kaum perempuan tidak bisa melakukan aktivitas yang luas dalam hal politik salah satunya ketika ikut dalam pemilihan anggota legislatif dalam proses kampanye yang terbatas dilakukan oleh kaum perempuan dikarenakan mereka juga harus membagi waktu untuk keluarga dan faktor keuangan juga menjadi penghambat bagi perempuan untuk maju dalam pemilihan anggota legislatif karena dianggap tidak mampu dalam mengeluarkan dana dalam proses kampanye, ketiga rendahnya keterwakilan perempuan di sebabkan karena masih berlakunya tradisi untuk menekan, bahkan sering mendikte peranan perempuan sebagai ibu dan istri oleh karena itu ada rasa timbul kurang percaya diri dari seorang perempuan sehingga hal inilah yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan.

Saran peneliti dalam penelitian ini pertama, seharusnya partai politik lebih memperhatikan kaum perempuan mencari persoalan apa yang menjadi penyebab rendahnya keterwakilan perempuan, memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan sesuai AD/ART partai politik. Kedua, kendala sosio ekonomi diperlukannya dukungan dari keluarga agar perempuan dapat leluasa berpartisipasi dalam politik, dukungan dari keluarga akan sedikit meringankan beban kaum perempuan untuk ikut berkiprah di dunia politik, partai politik juga seharusnya sering dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran perempuan di legislatif. ketiga, ideologis dan psikologis faktor ini juga menjadi penghambat politik perempuan maka dari itu partai politik harus harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menghilangkan stigma masyarakat

tentang perempuan yang tidak bisa memimpin. Salah satunya dengan lebih sering melakukan sosialisasi tentang perempuan kepada masyarakat.